

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama lima dekade, kehidupan masyarakat Kolombia diwarnai dengan ketegangan akibat konflik sipil yang terjadi di negara ini. Konflik tersebut menjadi trauma mendalam bagi setiap masyarakat Kolombia, khususnya bagi mereka yang berhadapan langsung dengan konflik. Awalnya konflik sipil ini dilatarbelakangi oleh tragedi *La Violencia* (1940-1960): perseteruan politik antara dua golongan yang berbeda ideologi yaitu Liberalis dan Konservatif (Parsons, et al. 2025). Sebanyak 200.000 ribu nyawa terbunuh dalam tragedi *La Violencia* (Klobucista Claire, 2017). Namun, seiring waktu, konflik yang terjadi antara dua kelompok politik tersebut terus mengalami *eskalasi* yang berakhir pada pecahnya konflik sipil di masyarakat. Di saat yang sama, kondisi internal Kolombia khususnya perekonomian masyarakat juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Pada masa itu, sebagian besar masyarakat Kolombia hidup dibawah garis kemiskinan yang membuat ketimpangan antara kaum miskin dan kaya kian meningkat, hal inilah yang juga mendasari konflik sipil ini kian memanas (Wulandari, 2025). Kondisi kian menegang saat bergabungnya beberapa kelompok pemberontak seperti; kelompok FACR (*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*) dan ELN (*Ejército de Liberación Nacional*). Awalnya kedua kelompok tersebut didirikan untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang dinilai merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah terutama akibat praktik privatisasi sumber daya alam yang diberlakukan oleh kelompok liberal (Fonseca, et al. 2024).

Seiring waktu, jaringan kedua kelompok ini mulai meluas yang dibuktikan dengan masifnya pertumbuhan kelompok tersebut. Namun, dibalik masifnya pertumbuhan kelompok tersebut, sikap mereka dirasa mulai menyimpang dari tujuan awal yang mana mereka sering kali melakukan pemberontakan dengan menggunakan kekerasan dan kejahatan untuk mencapai kepentingan mereka (Diniarti, 2019). Selain itu, banyak dari anggota kelompok tersebut hingga saat ini masih kerap melakukan aksi penculikan, kekerasan hingga pembunuhan terhadap masyarakat sipil terutama terhadap kaum perempuan (Weber, 2021). Penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut telah membuat kondisi yang terjadi di dalam konflik sipil makin berkembang, dan membuat situasi internal Kolombia kian kacau. Berdasarkan data dari *Council on Foreign Relation*, konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 220.000 orang, menyebabkan hilangnya sekitar 25.000 jiwa, dan memaksa sekitar 5,7 juta warga untuk mengungsi dari tempat tinggal mereka (Klobucista, et al. 2017). Dalam upaya untuk mengakhiri konflik sipil tersebut, pemerintah Kolombia mencoba berbagai upaya, tapi seluruh upaya tersebut selalu berakhir pada kegagalan. Hingga pada tahun 2016 lalu, hilal perdamaian di Kolombia baru menampakkan hasilnya, dibawah kepemimpinan Presiden Juan Manuel Santos, kelompok FARC beserta pemerintah Kolombia berhasil bersepakat serta menandatangani perjanjian damai yang dikenal dengan perjanjian *Havana*.

Perjanjian tersebut berisi enam poin penting yang menandai bahwa konflik ini telah berakhir; Reformasi di wilayah perdesaan; Membentuk FARC menjadi partai politik resmi; Mengakhiri konflik yang berkepanjangan; Komitmen untuk

memberantas narkoba; Menjamin keadilan untuk korban konflik; dan, Membentuk badan untuk mengawasi jalannya perjanjian damai ini (Wulandari, 2025). Perjanjian ini juga menjadi awal baru bagi Kolombia untuk membangun perdamaian dan menata kehidupan yang lebih baik. Sejak perjanjian tersebut diimplementasikan, terdapat beberapa perubahan positif yang terjadi, seperti menurunnya kriminalitas, kasus kekerasan dan pembunuhan serta berbagai macam ancaman yang melibatkan kelompok FARC (Wulandari, 2025). Diketahui menurut data yang dipublikasikan oleh UNODC (*UN Office on Drugs and Crime*) (2023), menunjukkan bahwa sejak perjanjian damai tersebut di deklarasikan pada tahun 2016, terjadi penurunan yang signifikan dalam angka kasus kekerasan terhadap masyarakat di wilayah Kolombia hingga tahun 2020 (WorldBank, 2023). Selain itu, pada enam bulan pertama implementasi perjanjian tersebut, kelompok FARC menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memenuhi perjanjian tersebut, Hal ini dibuktikan dari pengembalian senjata dari masing-masing pejuang FARC, dari operasi tersebut terdapat 8.112 senjata serta hampir 1,3 juta peluru yang disita (United Nation, 2017).

Meskipun, dalam beberapa aspek deklarasi damai tersebut berhasil berkerja sebagaimana mestinya, namun perlu diingat bahwa deklarasi damai bukan hanya sekedar menghentikan konflik atau perlucutan senjata tetapi juga menyentuh dimensi *peacebuilding* di dalam masyarakat pasca konflik. Pada praktiknya proses *peacebuilding* Kolombia masih menghadapi tantangan semenjak perjanjian Havana dideklarasikan. Hal tersebut dapat dilihat melalui sikap masyarakat Kolombia yang cenderung skeptis akan jalannya deklarasi damai tersebut. Rasa ketidakpercayaan

masyarakat tersebut besar dipengaruhi oleh konflik sebelumnya yang mana telah menyebabkan kekerasan melebur di dalam budaya masyarakat sehari-hari, kondisi ini juga diperparah dengan tidak ada keseriusan pemerintah Kolombia menyelesaikan kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok FACR sebelumnya (Marre, 2014). Aspek-aspek tersebut tentu dapat menghambat jalannya proses *peacebuilding* di Kolombia jika tidak diselesaikan secepat mungkin.

Melihat tingkat ketidakpercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap implementasi perjanjian damai tersebut. Pemerintah Kolombia berinisiatif untuk membentuk sebuah program yang didalamnya berfokus pada proses rekonsiliasi sosial masyarakat pasca konflik, program tersebut bertajuk *Cocinas para la Paz (Kitchen for Peace)*. Program ini merupakan kolaborasi antara departemen Kementerian Kebudayaan, Seni dan Pengetahuan Kolombia dengan organisasi pangan internasional yaitu FAO (*Food and Agriculture Organization*). Program ini awalnya merupakan bagian dari kebijakan gastronomi untuk memperluas, melindungi, serta mempromosikan pengetahuan tentang kuliner tradisional Kolombia. Namun, semenjak konflik tersebut berakhir khususnya tahun 2022, program ini bertransformasi menjadi sebuah agenda politik Kolombia yang bertujuan sebagai instrumen untuk melindungi keragaman dan kekayaan budaya melalui praktik serta produk kuliner tradisional negara sebagai faktor fundamental identitas negara, serta mempromosikan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan melalui praktik kuliner tradisional Kolombia (Minister of Culturas Colombia, 2025). Tujuan dari program ini juga diperkuat dengan pernyataan yang dijelaskan oleh Michaela Espinosa, Spesialis senior pangan di FAO Kolombia,

dalam pernyataannya ia menjelaskan bahwa program ini tidak hanya sekedar mempromosikan budaya melalui kuliner saja, melainkan juga mempromosikan dapur sebagai medium untuk menyampaikan kisah, emosi, kasih sayang, serta pengetahuan (FAO Colombia, 2025).

Program ini tidak hanya berkontribusi dalam mempromosikan budaya dan dapur sebagai alat untuk membangun perdamaian, namun program ini juga berkontribusi untuk memenuhi agenda global yaitu *SDG's (Sustainable Development Goals)*. Beberapa agenda *SDG's* yang ingin dicapai melalui program ini ialah, Agenda 2 (*Zero Hunger*), Agenda 5 (*Gender Equality*), dan Agenda 11 (*Sustainable Cities and Community*) (Minister of Culturas Colombia, 2025). Lalu dalam program ini, terdapat banyak kegiatan yang diadakan seperti, seminar, lokakarya, kursus virtual tentang makanan tradisional, serta pertukaran pengetahuan yang dilaksanakan di 24 wilayah termasuk wilayah yang rawan akan konflik. Pada tahun 2025, fokus program ini lebih kearah memperkuat transfer pengetahuan antargenerasi, penguatan kapasitas lokal, dan pertemuan masyarakat serta dialog pengetahuan (Minister of Culturas Colombia, 2025).

Meskipun begitu, pada kenyataannya proses rekonsiliasi sosial pada ranah internal Kolombia masih jauh dari ekspektasi yang dibayangkan khususnya karena faktor stigma negatif terhadap mantan kombatan yang berkembang di dalam masyarakat. Pada survei online yang dilakukan oleh Isabel Güiza Gómez dan Abby Córdova pada tahun 2023 dengan konteks untuk mengetahui seberapa tinggi kekerasan terhadap pembela HAM khususnya eks kombatan. Survei tersebut menyatakan bahwa hanya 22% responden yang bersikap positif terhadap

keberadaan eks kombatan, sedangkan 77% responden merasa terancam dengan keberadaan mereka (Gómez, 2024). Survei tersebut memperlihatkan rendahnya integritas sosial di Kolombia, stigma yang berkembang di masyarakat Kolombia menggambarkan bahwa mantan kombatan memiliki sifat yang kejam dan cenderung menciptakan rasa tidak aman jika berada disekitar masyarakat. Stigma tersebut juga diperparah dengan tingginya kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak ELN dan EMC (*Estado Mayor Central*) kelompok pembangkang FACR yang tidak setuju dengan perjanjian damai 2016. Hal ini membuat proses rekonsiliasi sosial di Kolombia masih jauh dari tujuan perjanjian damai 2016. Maka dari itu, penting bagi penulis untuk menganalisa serta menggali lebih dalam program *Cocinas para la Paz* sebagai alat strategis dalam merekonstruksi kembali sosial masyarakat serta membangun perdamaian di sektor internal Kolombia dengan menggunakan kekayaan kuliner Kolombia.

Selain itu, penelitian ini dilakukan karena studi Hubungan Internasional sangat jarang mengangkat dimensi kebudayaan dalam proses peacebuilding. Selama ini aktor internasional lebih cenderung menggunakan cara yang lebih bersifat formal dan politis seperti perjanjian dan intervensi yang pada akhirnya membuat proses rekonsiliasi sosial berjalan kaku dan tujuan perdamaian tidak tersampaikan dengan baik. Sementara pendekatan berbasis kebudayaan seperti sektor gastronomi masih jarang disorot secara mendalam padahal dimensi tersebut memiliki potensi besar untuk dijadikan medium dalam proses rekonsiliasi sosial khususnya program yang ingin menyentuh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan karena, dimensi kebudayaan merupakan salah satu dimensi yang dapat diterima

dengan mudah dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan lebih jauh tentang bagaimana peran dimensi kebudayaan khususnya sektor gastronomi dalam proses peacebuilding, yang tentunya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi perdamaian di ranah Hubungan Internasional.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa lebih mendalam mengenai peran *gastronomi* dalam program *Cocinas para la Paz* sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 dalam membangun perdamaian serta merekonstruksi kembali sosial masyarakat Kolombia yang sebelumnya pernah hancur sebagai akibat dari konflik sipil. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada pembahasan mengenai strategi program tersebut dalam membangun perdamaian di tengah masyarakat kolombia tanpa meluas ke bidang lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan pertanyaan penelitian “Bagaimana program *Cocinas para la Paz* dapat digunakan sebagai alat dalam pembangunan perdamaian di Kolombia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Menganalisis bagaimana program *Cocinas para la Paz* memanfaatkan praktik kuliner dalam proses rekonstruksi sosial masyarakat pasca-konflik di Kolombia.

2. Menggali peran *gastronomi* sebagai alternatif baru untuk membangun perdamaian dan kepercayaan publik.
3. Menjelaskan bagaimana dapur dijadikan ruang interaksi sosial yang mendukung terbentuknya narasi perdamaian antara masyarakat sipil dan mantan pelaku konflik.
4. Menilai sejauh mana *Cocinas para la Paz* dapat menjadi model rekonsiliasi sosial berbasis budaya di konteks pasca-konflik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam kajian hubungan internasional, khususnya pada topik *peacebuilding*, dengan menekankan bagaimana pendekatan gastronomi dapat dimanfaatkan sebagai alat pembangunan perdamaian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi terhadap pengembangan studi identitas sosial dan rekonstruksi masyarakat pasca-konflik dalam perspektif konstruktivis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi aktor-aktor internasional lain yang sedang mengalami atau telah melewati konflik internal, bahwa pendekatan berbasis budaya lokal seperti kuliner dapat menjadi alternatif baru dalam membangun kembali hubungan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi

referensi tambahan bagi pengambil kebijakan, lembaga rekonsiliasi, serta organisasi masyarakat sipil dalam merancang program-program rekonsiliasi sosial.

